

## Seluruh ASN Dituntut Melek Digitalisasi



KR-Asrul Sani

**Triyono MSI (5 - kiri) bersama Dewan Pengurus Korpri setempat dan para Duta Korpri.**

**WATES (KR)** - HUT ke-52 Korps Korpri Pemkab Kulonprogo dimaknai sebagai momentum bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk terus berupaya meningkatkan profesionalisme dan kinerja mereka dengan menyesuaikan tantangan perkembangan zaman khususnya di era digital dewasa ini.

"Di tengah dinamika Nasional yang cukup dinamis

baik sosial politik dan sebagainya, maka seluruh ASN anggota Korpri dituntut mampu menyesuaikan diri di era digitalisasi ini, melek digitalisasi," tegas Sekretaris Daerah (Sekda) Kulonprogo, Triyono SIP MSI saat menjadi Irup Upacara Peringatan HUT ke-52 Korpri di halaman kantor pemkab setempat, Rabu (29/11).

Nampak ikut hadir mengikuti upacara para

Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan perwakilan anggota Korpri Kabupaten Kulonprogo. Termasuk Dewan Pengurus Korpri setempat Eko Wisnu Wardhana SE dan Sudarmanto MSI.

Dalam kesempatan tersebut Sekda Triyono menyerahkan penghargaan bagi Duta Korpri dan pemenang loma tenis meja.

Triyono mengungkapkan, di era digital saat ini, seluruh ASN di berbagai jenjang dan usia harus mampu menyesuaikan diri dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya di bidang teknologi informasi sebagai salah satu upaya seluruh anggota Korpri untuk meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat. **(Rul)**

## TUNGGU PP UU 20 ASN 2023

# Nasib Ribuan Non-ASN Belum Jelas

**WONOSARI (KR)** - Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Gunungkidul belum dapat memberikan kejelasan nasib ribuan pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN) menyusul disahkannya Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023.

Badan Kepegawaian masih menunggu peraturan pemerintah (PP) atas undang-undang tersebut. "Sebelum ada peraturan pemerintahnya belum dapat memberikan penjelasan penataan non-ASN," kata Kepala BKPPD Kabupaten Gunungkidul Iskandar SIP MPA, Rabu (29/11). Dalam UU ASN 2023 mengatur mengenai peng-

hapusan pegawai honorer. Dalam hal ini Instansi pemerintahan dilarang untuk mengangkat tenaga honorer. Penataannya akan terus dilakukan pegawai non-ASN atau yang sering disebut pegawai honorer wajib diselesaikan paling lambat Desember 2024.

Berdasarkan data yang ada di BKPPD jumlah pegawai non ASN sebanyak



KR-Endar Widodo  
**Iskandar SIP MPA**

2.666 orang. Khusus untuk guru non-ASN jumlahnya 353 orang, sebagian sudah diterima sebagai P3K tahun 2022, sisanya tinggal kurang dari 100 orang.

Data ini berbeda dengan yang disampaikan Ketua Pengurus Kabupaten (PK) PGRI Kabupaten Gunungkidul Tijan SSos. Jumlah guru penggerak saja 142 orang, ada 440 PTT, GTT dan PTY dan GTU dan GTT honor daerah (Honda) SD 4 orang, SMP 2 orang, PTT SMP 14 orang, PTT Koordinator wilayah pendidikan (korwilbidik) 1 orang, jumlah totalnya 603 orang.

"Jumlah tersebut belum terhitung ratusan GTT yang ada di sekolah-sekolah dengan honor dari dana Biaya Operasional Sekolah (BOS)," tambahnya. **(Ewi)**

## Melonjak, Kasus Pernikahan Dini

**WATES (KR)** - Permohonan nikah dini atau dispensasi nikah ke Pengadilan Agama (PA) Wates, Kabupaten Kulonprogo tahun ini meningkat dibanding tahun sebelumnya. Panitera Muda Hukum PA setempat, Agus Wantoro mengungkapkan sedikitnya 64 pasangan berusia di bawah 19 tahun telah mengajukan dispensasi nikah.

"Tahun 2022 tercatat 54 perkara, sedangkan tahun ini terhitung sejak Januari sampai 22 November kemarin sudah ada 64 perkara. Jika diprosentase maka kenaikannya berkisar 8,4 persen. Rata-rata pemohon berusia 17-18 tahun. Ada juga yang masih 14 tahun. Jadi mayoritas masih SMP-SMA," katanya, Selasa (28/11).

Diungkapkan, jumlah pemohon nikah dini tahun ini didominasi pasangan sudah hamil di luar nikah. Prosentasenya, 66 persen dari total jumlah perkara.

"Data terakhir penyebabnya sekitar 66 persen karena sudah hamil. Jadi memang 66 persen kita hitung sudah hamil duluan, sementara 34 persen lainnya memang su-

dah ada niat dari pemohon untuk nikah muda. Salah satu alasannya, untuk menghindari perzinahan," ungkapnya.

Lebih lanjut diungkapkan, dari 64 perkara tersebut, dua di antaranya tidak dikabulkan PA Wates. Lantaran pemohon masih berusia 14 tahun sehingga belum siap secara psikologis, merujuk hasil konseling dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

"Alasan ditolak karena secara psikologis memang belum siap melaksanakan pernikahan sesuai hasil konseling dari P2TP2A. Faktor usia juga berpengaruh, masih berusia 14 tahun untuk yang putri, jadi secara psikologis belum siap," jelas jelasnya menambahkan 62 pasangan lain dikabulkan karena dinilai sudah siap secara psikologis dan materi.

PA Wates ungkapnya terus mendorong agar pemohon nikah dini bisa tetap melanjutkan studi pasca pernikahan. Pihaknya tidak ingin pemohon putus sekolah gara-gara berumah tangga. **(Rul/Wid)**

## Juara Umum Jelajah Wisata Kulonprogo 2023

**WATES (KR)** - MAN 2 Kulonprogo berhasil meraih Juara Umum dalam even Pramuka Jelajah Wisata Kulonprogo (Jelitaku) Tahun 2023 yang dilaksanakan 23 hingga 26 November. Kontingen MAN 2 Kulonprogo berhasil meraih 8 medali, terdiri dari 5 juara 1, 2 juara 2, dan 1 juara 3.

Berikut hasil kejuaraan yang diraih MAN 2 Kulonprogo terdiri dari Sangga Terbaik 1 Putra, Sangga Terbaik 1 Putri, Juara 1 Giat Pramuwisata handal Putri, Juara 1 Giat Petualangan Harta Karun Putra, Juara 1 Giat Stand up Comedy Putra, Juara 2 Giat Fotografi Putri, Juara 2 Giat Pramuwisata handal Putra, dan Juara 3 Stand



KR-Widiastuti

**Asda 1 Kulonprogo Jazil Ambar Was'an menyerahkan piala.**

up Comedy Putri. Jelitaku ditutup Minggu (26/11) oleh Kak Drs Jazil Ambar Was'an selaku Asisten Daerah 1 Kabupaten Kulonprogo di Dermaga Wisata Pantai Glagah.

Jelitaku merupakan program tahunan dari Kwartir Cabang Kulonprogo yang

ditujukan kepada anggota pramuka penegak dan pramuka pendega, baik anggota Gugus Depan MA/SMA/SMK, Satuan Karya, maupun dari Satuan Komunitas. Kegiatannya berbenak pengembangan untuk meningkatkan pengetahuan, prestasi, dan sebagai

evaluasi kualitas pembinaan pramuka penegak dan pramuka pendega di Kwarcab. Selain itu sebagai sarana peran Pramuka dalam pengembangan, pengenalan, dan promosi pariwisata Kulonprogo. Kegiatan Jelitaku XVIII tahun ini kembali menggunakan konsep pengembangan.

Hartiningih Kepala MAN 2 Kulonprogo menyampaikan rasa syukur dan bangga. "Alhamdulillah, juara umum dengan membawa pulang 8 kejuaraan. Ini sebuah pencapaian yang tidak hanya membanggakan bagi kita, tetapi juga menjadi bukti kesungguhan, kerja keras, dan semangat pantang menyerah," ujarnya, Rabu (29/11). **(Wid)**

## APBD KULONPROGO 2024

# Pemkab Menetapkan Prioritas Pembangunan

**WATES (KR)** - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo telah menetapkan sejumlah program pembangunan yang telah menjadi prioritas dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024.

"Program-program pembangunan tersebut kami targetkan penyelesaiannya hingga tuntas," kata Pj Bupati Kulonprogo, Ni Made Dwipanti Indrayanti MT usai Rapat Paripurna (Rapur) Penandatanganan Perseutan Bersama terhadap Raperda tentang APBD Kulonprogo 2024, di Gedung DPRD setempat, Pengasih, belum lama ini.

Diungkapkan, salah satu proyek pembangunan yang cukup besar, pembangunan kawasan pantai selatan. Pemkab setempat berencana melakukan penataan hingga pengembangan di kawasan tersebut. Selain itu, pengolahan sampah juga jadi salah satu program prioritas.

Pihaknya ingin meningkatkan pengolahan sampah di Kulonprogo dengan memanfaatkan teknologi. "Sudah diupayakan agar pengolahan sampah berbasis teknologi masuk anggaran," jelas Ni Made.

Disamping itu, Pemkab Kulonprogo juga memastikan proyek infrastruktur seperti jalan tetap jadi program wajib dalam APBD 2024. Saat ini ada sejumlah jalan rusak dan membutuhkan sentuhan perbaikan.

Ditegaskan, dalam proses pembangunan pemkab tetap menerapkan skala prioritas dalam memanfaatkan anggaran. Sehingga harus dilakukan pembagian anggaran ke berbagai pos. "Kami berharap pada 2024 nanti ada perubahan di Kulonprogo," harapnya.

Sedangkan Ketua DPRD Kulonprogo, Akhid Nuryati SE berharap eksekutif memanfaatkan APBD 2024 secara efektif dan tepat sasaran. Terutama dalam mengatasi kemiskinan ekstrem hingga penanganan stunting.

"Perlu disiapkan berbagai program jaminan bagi masyarakat miskin di Kulonprogo. Salah satunya yang terpenuhi dalam APBD 2024 adalah BPJS bagi tenaga kerja informal," ujarnya mengingatkan proporsi anggaran untuk kebutuhan dasar masyarakat tetap disediakan. **(Rul/Wid)**

## 1.027 PETANI DAN BURUH TEMBAKAU

# Terima BLT Cukai Tembakau

**WONOSARI (KR)** - Bupati Gunungkidul H Sunaryanta menyerahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Bantuan Sosial dari Kube FM dan UEP PKH Graduasi di Kalurahan Grogol, Kapanewon Paliyan, Selasa (28/11).

Menurut Kepala Dinas Sosial Asti Wijayanti, bantuan ini merupakan bagian dari transfer daerah yang diberikan kepada kabupa-

ten penghasil cukai atau penghasil tembakau diberikan kepada petani dan buruh tembakau.

"Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBH CHT) diberikan kepada Petani Tembakau dan/atau Buruh Tani Tembakau di 8 Kapanewon di Kabupaten," katanya.

Dijelaskan untuk mendapatkan bantuan DBH CHT ini harus memenuhi beberapa syarat salah satu-

nya berprofesi sebagai petani atau buruh tembakau. Unuk pendampingan DBH CHT dimulai dari bulan Juli dan berakhir Desember tahun 2023," Besarnya bantuan bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar Rp.616.200.000, diberikan kepada 1.027 petani dan buruh tani tembakau," ujarnya.

Dari jumlah total bantuan diberikan kepada masing-masing penerima manfaat Rp 600.000,- masuk dalam Buku Tabungan Bank Daerah Gunungkidul (BDG). Selain itu juga diberikan kepada 4 Kelompok KUBE FM Penumbuhan dengan bantuan Rp 80.000.000,- masing-masing KUBE mendapat bantuan Rp 20.000.000,-

"Bantuan dan stimulan ini agar dapat dimanfaatkan sebaik mungkin agar bisa menghasilkan stimulan lagi," ujarnya, **(Bmp)**



KR-Bambang Prwanto

**Petani dan buruh tembakau terima BLT Dana Bagi Hasil Cukai.**

## PERESMIAN 2000 SAMBUNGAN BPBL SE DIY KERJA SAMA ESDM

# Gandung Pardiman: Terangkan Pemukiman Bangkitkan Usaha, Kurangi Kemiskinan



KR-Dedy EW

**Drs HM Gandung Pardiman menyalaikan meteran listrik program BPBL.**

**WONOSARI (KR)** - Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Golkar Drs HM Gandung Pardiman MM meresmikan dan menyalaikan pertama Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) DIY di Kalurahan Karangrejek, Wonosari, Gunungkidul, Rabu (29/11).

Seluruh DIY terdapat bantuan 2.000 BPBL, sebanyak 1.003 untuk Kabupaten Gunungkidul. "Kami berupaya untuk ikut serta menambah kemajuan kesejahteraan masyarakat melalui pemasangan bantuan listrik gratis. Bahkan selain untuk menerangi rumah atau pemukiman, di Gunungkidul muncul usaha di masyarakat. Di antaranya untuk perbengkelan, usaha kerajinan dan banyak jenis usaha lainnya. Seluruh DIY totalnya 2.000 BPBL," kata Gandung Pardiman di acara Peresmian dan Penyalaaan Pertama Program BPBL DIY di Kalurahan Karangrejek, Wonosari, Rabu (29/11).

Kegiatan dihadiri General Manager PT PLN Persero DIY Jateng M Sufin Hadi, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia Nur Hidayanto, Wakil Bupati Gunungkidul Heri Susanto SKom MSI, Pemerhati Energi Listrik Syarif Guska Laksana SH, Wakil DPRD Gunungkidul Heri Nugroho SS, Lurah Karangrejek Supramanca dan perwakilan warga penerima bantuan BPBL.

Peresmian ditandai dengan penyalaaan meteran oleh Drs HM Gandung Pardiman MM, proses pengisian token Wabup Heri Susanto, serta penempelan stiker Nur Hidayanto, Sedangkan dari PT PLN juga menyerahkan bantuan berupa sembako,



KR-Dedy EW

**Drs HM Gandung Pardiman MM bersama Kemeterian ESDM, PLN, Wabup Heri Susanto, Pemerhati Listrik Syarif Guska Laksana SH, Wakil DPRD Heri Nugroho**

Simbolis peresmian dilaksanakan di dua KK di Karangrejek yakni rumah milik Ratno dan Sutono.

Gandung Pardiman yang memiliki slogan Berani Berkorban, Jujur dan Peduli Semua ini berharap dengan adanya



KR-Dedy EW

**Syarif Guska Laksana SH menyampaikan sambutan.**

bantuan listrik gratis, akan mampu memberikan manfaat. Bisa mengatasi kemiskinan, dengan membangkitkan ekonomi masyarakat. Serta mengurangi angka pengangguran. Untuk DIY tahun ini sebanyak 2.000 BPBL, harapannya di tahun mendatang semakin meningkat. "Listrik diperlukan selain untuk penerangan, juga dimanfaatkan mendukung usaha ekonomi kreatif di masyarakat," jelas HM Gandung Pardiman MM yang juga Ketua DPD Golkar DIY ini.

General Manager PT PLN Persero DIY Jateng M Sufin Hadi, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Nur Hidayanto program listrik gratis bagi warga kurang mampu ini merupakan pemerintah dalam rangka mengatasi kemiskinan. Sehingga memberikan bantuan listrik gratis 900 volt. Melalui penerangan, harapannya bisa membuat kehidupan di rumah tangga semakin produktif. Melalui pemanfaatan seperti mesin jahit, alat pertukangan, sehingga ekonomi masyarakat akan semakin meningkat. Tentu harapannya ini memberikan manfaat cukup besar, dan bisa membuat masyarakat di DIY, maupun Gunungkidul menjadi lebih sejahtera," imbuhnya.

Pemerhati Energi Listrik Syarif Guska Laksana SH menambahkan, melalui program bantuan listrik gratis ini tentunya akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena selain bisa meningkatkan kesejahteraan, tentu adanya listrik di rumah tangga bisa mendukung berbagai usaha di masyarakat. Tentunya usaha di masyarakat ini akan membangkitkan ekonomi masyarakat. Sehingga kesejahteraan meningkat dan mampu untuk mengatasi pengangguran di Gunungkidul maupun DIY.

Lurah Karangrejek Supramanca menyampaikan terimakasih atas aspirasi yang dibawa HM Gandung Pardiman MM bersama Kementerian ESDM. Sehingga masyarakat yang selama ini belum memiliki listrik sendiri menjadi terbantu, serta bisa dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga. Selain itu, bisa mendorong tumbuhnya ekonomi maupun usaha mikro kecil di masyarakat. **(Ded)**



KR-Dedy EW

**Drs HM Gandung Pardiman MM bersama tamu undangan dan perwakilan masyarakat penerima program BPBL.**



KR-Dedy EW

**Drs HM Gandung Pardiman MM bersama warga di Karangrejek**